EFISIENSI SEKTOR PUBLIK SULAWESI SELATAN DENGAN TEKNIK PENDEKATAN *DATA ENVELOPMENT ANALYSIS*

Miftaqhul Adhilla[1], Syamsu Alam[2], Citra Ayni Kamaruddin[3]

[1]Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar
[1]email: miftaqhuladhilla@gmail.com
[2]Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar
[2]email: alam.s@unm.ac.id
[3] Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar
[3]email: citraayni@unm.ac.id

ABSTRACT

Unemployment is a major problem facing Indonesia. High unemployment has a direct and indirect effect on poverty caused by someone not having a job and income, crime that is prone to be committed by someone to meet their needs illegally and political problems. This study focuses on the efficiency of the public sector of regencies/cities in South Sulawesi. This study uses secondary data from non-managerial agencies and regional annual reports. Input and output variables are quantitative data, so this study is quantitative. The DEA calculation model is carried out by identifying input and output. One of the analysis methods used to assess DMU efficiency is DEA (Data Development Analysis). The input variables are PAD and balancing funds, the output variables are people working and GRDP, and DMU is the Regency/City of South Sulawesi Province. Based on DEAP data on public sector efficiency in South Sulawesi in 2022, only four regencies, namely Bantaeng, Takalar, Pangkep, and Barru, have 100% efficiency..

Keywords: *Efisiensi, DEA, Unempolyed, working people, PDRB.*

ABSTRAK

Pengangguran merupakan masalah utama yang dihadapi Indonesia. Tingginya pengangguran berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan yang dikarenakan seseorang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, kriminalitas yang rentan dilakukan seseorang untuk memenhi kebutuhan dengan cara ilegal dan masalah-masalah politik. Penelitian ini berfokus pada efisiensi sektor publik Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari instansi nonmanajerial dan laporan tahunan daerah. Variabel input dan output merupakan data kuantitatif, sehingga penelitian ini bersifat kuantitatif. Perhitungan model DEA dilakukan dengan mengidentifikasi input dan output. Salah satu metode analisis yang digunakan untuk menilai efisiensi DMU adalah DEA (Data Development Analysis). Variabel input adalah PAD dan dana perimbangan, variabel output adalah orang bekerja dan PDRB, dan DMU adalah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data DEAP tentang efisiensi sektor publik di Sulawesi Selatan tahun 2022, hanya empat kabupaten yaitu Bantaeng, Takalar, Pangkep, dan Barru yang memiliki efisiensi 100%.

Keywords: *Efisiensi, DEA, pengangguran, orang bekerja, PDRB.*

I. PENDAHULUAN

Fakta bahwa jumlah pekerjaan yang tersedia lebih sedikit daripada jumlah pekerja tidak sejalan denganpasar tenaga kerja, dan kurangnya informasi pasar tenaga kerja yang efektif juga menjadi masalah bagi pencari kerja. Pengangguran juga dikaitkan dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat perusahaan mengalami krisis ekonomi atau kondisi keamanan yang buruk, peraturan yang menghambat investasi dalam hal perizinan yang terlalu berbelit bagi investor yang

akan menanamkan modalnya, hambatan dalam ekspor-impor, dan masalah-masalah yang lain. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki pertumbuhan penduduk yang pesat, maupun total penduduk berdampak pada beberapa masalah, salah satunya adalah pengangguran. Dalam mengukur keberhasilan pembanunan ekonomi besarnya angka pengangguran juga memiliki peran penting.Hal ini karena tingkat pengangguran merupakan indikator tingkat kesejahteraan dari pembangunan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 untuk meningkatkan desentralisasi fiskal di Indonesia. Uang Asli Daerah (PAD) adalah uang yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pada pasal 1 angka 18. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157. Perkembangan ekonomi yang positif di satu sisi, mereka harus memaksimalkan kinerja pertumbuhan sebagai indikator aktivitas ekonomi yang tinggi dan di sisi lain mereka harus mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yakni meningkatkan kinerja ekonomi melalui perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi menurut *WorldEconomic Forum* (WEF) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun upaya pemerintah sudah cukup maksimal tetap masih banyak penduduk yang belum mendapatkan pekerjaan, masih bnyak yang lontang-lantung untuk mencari pekerjaan dan tidak sedikit yang menjadi pengemis ataupun pengamen diakibatkan susahnya mencari pekerjaan sedangkan manusia memiliki banyak kebutuhan.

Tabel 1. 1 Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah Pengangguran (jiwa)	Presentase
1.	2019	196.779	27%
2.	2020	269.817	38%
3.	2021	252.349	35%
	Total	**718.945**	

Agar mendukung perkambngan ekonomi maupun pembangunan daerahmenyeluruh, pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas untuk melakukan trobosan baru guna meningkatkan sumber pembiayaan. Seluruh pertanggungjawaban, pembiayaan dan pengelolaaan merupakan wewenang pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program-program pembangunan sehingga pemerintah daerah juga dapat mengindentifikasi hal utama yang harus dilakukan sendiri dalam hal publik.

Penelitian ini mengkaji pustaka yang relevan Zulfikar (2016) meneliti efisiensi sektor publik dalam pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010–2014. Berdasarkan temuan Data Envelopment Analysis (DEA), dapat disimpulkan: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan merupakan faktor input paling signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi DIY; 2. Lain-lain Pendapatan yang Sah berpengaruh sebesar 100% terhadap DIY dan Kabupaten Sleman tahun 2010–2014. Daat (2007) meneliti efisiensi lembaga keuangan perbankan dengan menggunakan

metode Data Envelopment Analysis (DEA) di BEI dan menemukan bahwa dari 19 bank yang dijadikan sampel, Mayapada International Bank dan Inter-Pacific Bank dinyatakan efisien dalam penggunaan input optimal dengan nilai efisiensi lebih dari 1 (>1), sedangkan 17 bank lainnya dinyatakan tidak efisien. Merini (2013) menggunakan Data Envelopment Analysis untuk menganalisis efisiensi belanja pemerintah sektor publik Asia Tenggara. Kajian DEA menemukan bahwa efisiensi belanja sektor publik Asia Tenggara bervariasi. Efisiensi sektor publik dan kinerja ekonomi regional (studi kasus kabupaten/kota di Jawa Timur) oleh Chusnah (2014). Winarso (2017) meneliti efisiensi sektor publik dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif karena variabel input dan outcome bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif yang berlandaskan pada positivisme menggunakan perangkat penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menguji hipotesis tentang populasi atau sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari lembaga nonmanajerial dan laporan tahunan daerah. Penelitian ini menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Statistik Keuangan Daerah Kabupaten Sulawesi Selatan, daftar alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran provinsi, serta data Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, PDRB, dan penduduk bekerja. Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan dan membaca data tentang topik tersebut. Sumber utama pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah atau PAD, yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan agar dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2017–2021, APBN memberikan dana perimbangan rupiah (Rp) kepada Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kebutuhannya. PDRB adalah nilai tambah dalam mata uang rupiah yang diciptakan oleh seluruh unit usaha di Sulawesi Selatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tercatat dalam jiwa.

DEA digunakan dalam penelitian ini. Metode berbasis pemrograman linier non-parametrik seperti metode DEA menilai dan membandingkan efisiensi Satuan Kerja Ekonomi (UKE). Metode DEA non-parametrik mengukur efisiensi Satuan Kerja Ekonomi (UKE) yang sejenis dengan menggunakan pemrograman linier (Daat, 2007). DEAP 2.1 dan SPSS 29.0 digunakan dalam penelitian ini.

Rumus pengukuran dasar efisiensi sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{output}{input} = \frac{virtual\ output}{virtual\ input} = \frac{\sum_{r=1}^{s} Ur\ Yr}{\sum_{i=1}^{m} Vi\ Xi}$$

Atau bisa ditulis dengan

$$\frac{U1Y1 + U2Y2 + \cdots \ldots \ldots \ldots + UsYs}{V1X1 + V2X2 + \cdots \ldots \ldots \ldots + VmXm}$$

Dimana Y_r = jumlah output $_r$
U_r = bobot tertimbang dari output $_r$
X_i = jumlah input $_i$
V_i = bobot tertimbang dari input $_i$

Nilai efisiensi dari pengukuran DEA adalah 0-100 persen. Belanja publik efisien jika nilainya 100; belanja sektoral tidak efisien jika nilainya kurang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa dari 24 kabupaten/kota yang dijadikan contoh, 4 kabupaten/kota efektif dalam pemanfaatan input optimum dengan nilai efisiensi 1, yaitu Bantaeng, Takalar, Pangkep,

dan Barru. Analisis ini mengonfirmasi temuan Daat (2007) yang menyebutkan hanya 2 dari 19 bank yang efisien.

Faktor yang mempengaruhi efisiensi Kab. Bantaeng adalah berdasarkan data PDRB, Kab. Bantaeng memiliki persentase PDRB tertinggi pada tahun 2022 hal ini didukung oleh ekonomi bantaeng yang meningkat pasca pandemi yang ditopang oleh sektor pertanian masyarakat melalui intervensi pemerintah seperti ketesediaan pupuk, asuransi pertanian, peternakan, perkebunan dan juga pemerhatian kepada sektor holtikultura. Setelah Covid-19 pemerintah Bantaeng juga memberikan perhatian penuh terhadap UMKM agar lebih berkembang dan memiliki daya saing.

Sedangkan efisiensi Kab. Takalar memiliki faktor yang berbeda, Kab. Takalar memiliki persetase realisasi terendah di tahun 2022, hal ini disebabkan oleh anjloknya realisasi PAD yang dari awal sudah digenjot terlalu tinggi sekitar 304 milyar. Tetapi, hal ini tidak menjadi penghalang untuk Kab. Takalar mencapai tingkat efisiensi karena berdasarkan data penelitian dalam output data orang bekerja dan PDRB Kab. Takalar tidak mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan berdasarkan teori The Liang Gie dn Miftah Toha (1978:8-9) dalam Ibnu Syamsi yang menyatakan efisiensi adalah perbandingan terbalik antara suatu hasil dengan usahanya, perbandingan ini dapat dilihat dari hasil yang maksimum dan usaha yang minimum. Merini (2013) menemukan bahwa negara-negara miskin seperti Kamboja dan Laos lebih efisien dibandingkan negara-negara menengah ke atas seperti Malaysia dan Thailand dalam belanja pemerintah sektor publik di Asia Tenggara.

Menurut Zulfikar (2016), Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. Penelitian ini sependapat dengan Chusnah (2014) dan Winarso (2017) yang menemukan bahwa pemborosan variabel input menyebabkan pemerintah Jawa Timur mengeksekusi belanja sektor publik secara tidak efisien. Analisis DEA berdasarkan teori Paul Heyne dalam Ismail (2009) "kita mengklaim bahwa kita dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan lebih sedikit cara, atau cara-cara yang dapat digunakan dapat menghasilkan lebih banyak tujuan yang diinginkan" menunjukkan cara mengurangi pemborosan varians input.

Teori Virfredo Pareto atau "Pareto Efficient" adalah alokasi barang melalui relokasi yang berbeda yang membuat setidaknya satu individu menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Setelah ditemukan pemborosan dalam penggunaan input, maka dilakukan Peer Group untuk menentukan satu atau lebih DMU yang akan dijadikan acuan atau benchmarking bagi DMU yang tidak efisien dengan menggunakan program SPSS dengan mengukur Square.

Tabel 4. 1 Hasil Perhitungan Model *Scale Efficiency*

DMU	*Overall Technical Efficiency (%)*	*Pure Technical Efficiency (%)*	*Scale Efficiency (%)*
1	96	98	97
2	89	89	99
3	88	100	88
4	97	97	100
5	100	100	100
6	81	85	95
7	81	89	91
8	72	75	96
9	100	100	100

10	100	100	100
11	85	86	98
12	84	93	90
13	83	83	100
14	78	79	98
15	73	75	97
16	78	80	97
17	70	75	92
18	77	82	94
19	95	98	96
20	81	81	100
21	93	96	97
22	86	88	98
23	80	83	96
24	79	82	97
Rata-Rata	**85**	**88**	**96**

Perhitungan model DEA menghasilkan peringkat efisiensi untuk setiap DMU pada tabel 4.25. Berdasarkan asumsi skala, skornya adalah OTE, PTE, dan SE. Skor OTE 1 menunjukkan DMU yang cukup efisien. Efisiensi DMU ini sebanding dengan yang lain. DMU dengan skor OTE di bawah 1 dianggap tidak efisien. Empat dari 24 DMU memiliki skor OTE 1, terutama DMU 3, 5, 9, dan 10. Keempat DMU ini efisien dan merupakan praktik terbaik karena kegunaan inputnya dalam memberikan hasil terbaik. DEA menganggap pemasok ini sebagai rekan. Rekan adalah DMU dengan praktik terbaik atau keadaan paling efisien yang dapat digunakan sebagai referensi bagi DMU yang tidak efisien untuk meningkatkan efisiensi (Muharrami dalam Winarso, 2017).

Berdasarkan studi, Kabupaten Bantaeng, Takalar, Pangkep, dan Barru merupakan contoh terbaik untuk memanfaatkan input yang ada. Anggaran PAD dan Dana Perimbangan memungkinkan distrik tersebut menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada distrik lain. Dengan demikian, untuk menjaga hal ini tetap berlanjut, pemerintah pusat bisa melakukan mengevaluasi dan mempertahankan anggaran yang diberikan. Sebagaimana dalam teori yang dikemukakan oleh Tom Christensen, Per Laergeid, Paul G Roness, dan Kejll Arne Rovil dalam Organization and the Public Sector yang menjelaskan bahwa sektor publik memiliki tugas utama untuk melayani rakyat serta tugas pentingnya adalah menyelesaikan konflik dan masalah dengan menggunakan sumber daya yang sesedikit mungkin.

Strong Efficient	***Weak Efficient***
Bantaeng	Takalar Pangkep Barru

DMU yang tidak efisien menggunakan DMU mana sebagai referensi, sesuai lampiran. DMU benchmarking yang efisien memiliki nilai efisiensi untuk faktor-faktor terkini, sehingga menjadikannya yang paling stabil untuk mengubah input menjadi output. Kecuali input berubah atau variabel penting lainnya berubah, DMU ini akan tetap efisien di masa mendatang, seperti penurunan anggaran besar untuk meningkatkan kemiskinan. DMU dengan angka efisiensi yang sangat kecil atau nol, atau benchmarking yang tidak efisien, memiliki utilitas input yang merupakan outlier dalam banyak parameter, sehingga menjadikannya tidak efisien jika output atau input berubah. Dengan demikian, DMU ini tidak dapat membantu DMU lain meningkatkan kinerja.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan statistik DEAP tentang efisiensi sektor publik di Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan tahun 2022, hanya 4 kabupaten yang memiliki efisiensi 100%Demikian, telah dilakukan

benchmarking terhadap kabupaten/kota yang inefisien guna meningkatkan efisiensi dengan mengacu pada kabupaten yang efisien.

V. REFERENSI

Ahmad, S. W. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengangguran di Sulawesi Selatan Periode 2006-2012.* UIN Alauddin Makassar,Makassar.

Aprilianda, G. M. A. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi JawaTimur. *Jurnal Ilmiah*.

Asdar. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi-Selatan. *Kritis, II*.

Chusnah, S. (2014). Efisiensi Sektor Publik dan Kinerja Ekonomi Daerah (Studi Kasus Kabupten/Kota di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah*.

Hia, Y. D. (2013). Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam MenanggulangiPengangguran. *Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI SumateraBarat, Vol. 1*.

Iyam L. Dua, J. J. R. (2022). Kajian Efisiensi dan Efektivitas Kerja Karyawan Bidang Administrasi pada PT. Manado Media Grafika. *MABP, Vol. 4*.

Kurnia, A. S. (2006). Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik dengan Metode Free Disposable Hull (FDH). *Jurnal Bisnis Strategi, Vol. 15*.

Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah SatuDekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol. 2*,hlm. 30-45.

Pengembangan Masyarakat Agribisnis Masalah Sosial : Pengangguran di Sulawesi Selatan. (2015). Universitas Halu Oleo, Kendari.

Rahayau, S. A. T. (2004). Peranan Sektor Publik dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Surakata (1987-2000). *8*.

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUNANGGARAN 2021 PROVINSI SULAWESI SELATAN. (2020). Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia.